

Judul : Kementan kembangkan perkebunan & hortikultura: petani kecil jangan diabaikan
Tanggal : Minggu, 12 Oktober 2025
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

Kementan Kembangkan Perkebunan & Hortikultura Petani Kecil Jangan Diabaikan

Senayan mendukung rencana Kementerian Pertanian (Kementan) mengembangkan program perkebunan dan hortikultura. Program itu dinilai sejalan dengan cita-cita besar Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan.

ANGGOTA Komisi IV DPR Jaelani mengatakan, Kementan mesti menyusun roadmap atau peta jalan yang jelas dan terukur terkait program yang dialokasikan anggaran sebesar Rp 9,95 triliun tahun 2026.

"Penggunaan anggaran yang besar itu benar-benar harus diarahkan secara efektif dan berorientasi hasil," tegasnya, Minggu (11/10/2025).

Diketahui, perkebunan dan hortikultura adalah kegiatan bercocok tanam di kebun untuk menghasilkan tanaman seperti buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan bunga, yang memiliki nilai tinggi. Program pengembangan perkebunan dan hortikultura dinilai sangat strategis.

Jaelani menegaskan, tanpa arah jelas dan peta jalan yang terukur, potensi besar program ini bisa tidak optimal. Kementan harus memastikan bahwa setiap rupiah betul-betul berkontribusi pada kemandirian pangan nasional.

Dia mengapresiasi, program ini karena mampu menciptakan

1,6 juta lapangan kerja baru. Namun, target harus jelas dan terukur karena ini sangat fantastis, sehingga harus ada rencana detail bagaimana 1,6 juta lapangan kerja itu bisa terealisasi. Terutama melibatkan petani muda.

"Regenerasi petani penting agar keberlangsungan pertanian Indonesia tetap terjaga," tegas politikus PKB ini.

Selain itu, Jaelani menekankan pentingnya memastikan pengembangan perkebunan dan hortikultura tidak hanya dikuasai oleh pemodal besar. Petani kecil juga harus menjadi subjek utama dalam kebijakan pertanian nasional.

"Kita tidak boleh membiarkan sektor ini hanya dikuasai oleh kelompok bermodal besar, sementara petani kecil tetap sengsara," tandasnya.

Dia meminta agar aspek pemasaran hasil pertanian menjadi perhatian serius Pemerintah. Caranya, pengawasan terhadap rantai distribusi dan harga harus dikontrol secara ketat agar harga di tingkat petani tetap menguntungkan.



Jaelani

"Jangan sampai ketika produksi meningkat, harga malah jatuh. Itu sering terjadi. Perlu sistem pengendalian dan jaminan pasar yang berpihak kepada petani," sarannya.

Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan menambahkan, lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di kawasan Ijen, Bondowoso, dapat dimanfaatkan untuk tanaman perkebunan dan hortikultura. Langkah ini solusi realistis atas konflik pemanfaatan lahan antara petani dan perusahaan yang telah berlangsung bertahun-tahun.

"Selama ini masyarakat Ijen telah mengelola lahan di kawasan

HGU PTPN untuk menanam berbagai komoditas hortikultura, meski secara administratif belum tercantum dalam peruntukan HGU," ujar Nasim dalam keterangannya, Sabtu (11/10/2025).

Menurut Nasim, sesuai realitas di lapangan menunjukkan hortikultura sudah menjadi sumber penghidupan utama warga. Karena itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bondowoso mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat (Pempus) agar aktivitas ini dilegalkan.

"Usulan tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang penerbitan kawasan hutan dan perkebunan," ujar Nasim.

Pemerintah, kata Nasim, ingin memastikan pengelolaan lahan tetap sesuai regulasi, tapi tidak menutup ruang bagi masyarakat untuk berproduksi.

"Kami ingin penyelesaiannya berkeadilan, tidak hanya menerbitkan, tapi juga memberi ruang hidup bagi masyarakat," kata politikus PKB ini.

Namun demikian, Nasim mengingatkan agar rencana legalisasi hortikultura tidak mengabaikan faktor ekologi. Aktivitas pertanian harus tetap menjaga keseimbangan lingkungan agar kawasan

Ijen tidak mengalami kerusakan seperti banjir atau longsor.

"Kita ingin produktivitas jalan, tapi alam juga tetap lestari," harap legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan hilirisasi sektor perkebunan dan hortikultura dapat menyerap 1,6 juta tenaga kerja baru dalam waktu dua tahun saja.

Pasalnya ada enam komoditas unggulan yang bakal dihilirisasi, yakni tebu, kakao, kopi, kelapa dalam, mente, hingga pala/lada. Agar program bisa dieksekusi, Pemerintah mengalokasikan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp 9,95 triliun pada tahun 2026. Adapun lahan tanam yang ditargetkan mencapai 870.890 hektare (ha).

"Kami dapat Rp 9,95 triliun, Rp 5 triliun kita akan berikan benih bibit pada seluruh petani Indonesia," ujar Amran di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Lewat strategi hilirisasi, Amran yakin sektor perkebunan dan hortikultura tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tapi juga memperkuat daya saing produk ekspor lokal di pasar global. ■ TF